

Kolektivisme dan Heterogenitas Etnis sebagai Kendala Demokrasi di Indonesia

Galih Wisnuaji^a

^a*Universitas Airlangga, Faculty Social and Political Science, Magister of
International Relations Department. Email: galihwisnuaji10@gmail.com*

This paper explores the impediments of liberal democracy in Indonesia in order to understand why after more than a decade since its initial application in 2004, it is still incapable of showing its significance in Indonesia's governance as well as bringing equality for Indonesian people. It argues that the impediments of democracy in Indonesia are the culture of collectivism of Indonesian people and the diversity of ethnics. The first section examines democracy has been worked in Indonesia, which focuses on democracy in theoretical aspects. The second section discusses the two impediments of democracy in Indonesia, starts from discussing about collectivism culture that applied in Indonesia and diversity of ethnics and then tries to find why those two aspects hinder democratic system works properly in Indonesia.

Keywords: Indonesia, democracy, collectivism, ethnic diversity

Tulisan ini akan membahas mengenai kendala demokrasi liberal di Indonesia karena sejak pertama kali digunakan pada tahun 2004, demokrasi di Indonesia terlihat masih stagnan dan belum mampu menunjukkan performa terbaik (Mietzner, 2014a; Törnquist, 2014). Menurut Ober (2013), demokrasi berkomitmen terhadap kebebasan dan *political equality*, tetapi sejauh ini masih belum bisa menunjukkan yang terbaik bagi Indonesia. Penulis melihat bahwa ada dua aspek yang mengganggu performa demokrasi di Indonesia, yang pertama adalah budaya kolektivisme, yang dapat ditemukan di hampir semua negara-negara di belahan bumi bagian Timur, termasuk Indonesia. Menurut de Tocqueville (2000), demokrasi hanya cocok jika diaplikasikan di negara-negara dengan budaya individualisme yang menurut Hofstede (2001) berada di Barat. Aspek kedua adalah keberagaman etnis Indonesia. Menurut Merkel dan Weiffen (2012), heterogenitas etnis dianggap sebagai ancaman bagi demokrasi di negara-negara maju yang sudah sejahtera karena dapat mendestabilisasi politik yang sudah 'dewasa,' dan di lain sisi

bisa juga menjadi rintangan bagi penguatan negara-negara yang sedang memulai berdemokrasi. Fish dan Brooks (2004) menambahkan bahwa sejauh ini demokrasi hanya sukses jika digunakan di negara dengan masyarakat yang *monoethnic*, sementara Indonesia adalah salah satu negara paling multietnis di dunia (Fearon, 2003).

Dalam tulisan ini, penulis akan mencoba mengeksplorasi kolektivisme dan heterogenitas etnis untuk mengetahui secara teoritis penyebab demokrasi di Indonesia belum berjalan dengan baik. Penulis akan menjabarkan mengenai kondisi demokrasi Indonesia saat ini. Kemudian akan dilanjutkan dengan eksplorasi mengenai kolektivisme dan heterogenitas etnis yang ada di Indonesia dan bagaimana kolektivisme dan heterogenitas menjadi kendala bagi demokrasi. Penulis juga akan memberikan beberapa komparasi antara Indonesia dengan negara-negara lain yang identik untuk memperkuat fakta mengenai ketidaksiuksesan demokrasi yang ada di negara-negara kolektif ataupun multietnis.

Indonesia mulai memasuki era demokrasi pada tahun 2004 setelah melewati enam tahun masa transisi menuju demokrasi (Eldridge, 2002). Selama lebih dari satu dekade, Indonesia telah dipimpin oleh dua presiden, Susilo Bambang Yudhoyono dan Joko Widodo, namun hasil dari transisi menuju demokrasi masih belum cukup berhasil (Mietzner, 2014a). Menurut Fukuyama (2015), demokrasi liberal modern mengkombinasikan tiga *basic institutions* yaitu; *the state*, *rule of law*, dan *democratic accountability*. *The state* atau negara adalah *coercive power* yang mengkonsentrasikan *power* untuk menjaga perdamaian, menjaga rakyat dari musuh eksternal, memaksakan hukum, dan menyediakan *basic public goods*. Kemudian, *the rule of law* adalah rangkaian hukum, yang merefleksikan nilai-nilai masyarakat, yang dibentuk bukan hanya untuk masyarakat, tetapi juga orang-orang yang memegang kekuasaan. Terakhir, *democratic accountability* mencari kepastian bahwa pemerintah bertindak menurut kepentingan masyarakat. Demokrasi liberal menyeimbangkan institusi-institusi yang berjalan secara kontradiktif tersebut. Negara menggunakan *power*, hukum dan *democratic accountability* memaksa orang-orang yang berkuasa dalam negara untuk memastikan bahwa kebijakan-kebijakan mereka adalah untuk kepentingan publik (Fukuyama, 2015).

Di Indonesia, tiga institusi dasar masih belum mampu berjalan dengan baik, sehingga membuat demokrasi Indonesia terlihat masih mengalami stagnasi dan belum mengalami perbaikan yang signifikan sejak masa transisi (Mietzner, 2014a; Mietzner, 2014b). Diamond (2009) merasa skeptis dengan tiga institusi yang disebut oleh Fukuyama (2015) di negara Indonesia. Level pemerintahan, menurut Diamond (2009), masih sangat memprihatinkan. Memang *civil liberty* dan hak politik meningkat sejak tahun 2005, tetapi pemerintahan demokratis Indonesia masih dianggap tidak mampu menjalankan demokrasi dengan baik. Menurut Diamond (2009), pemerintahan demokrasi di Indonesia masih sangat jauh dari harapan untuk membawa Indonesia mencapai masyarakat demokratis. Diamond (2009) juga menyoroti masalah *rule of law* di Indonesia dengan menganggap bahwa hukum di Indonesia masih sangat lemah.

Sementara itu, akuntabilitas juga tidak bisa diharapkan untuk membantu Indonesia menjadi lebih demokratis. Diamond (2009) melanjutkan bahwa akuntabilitas politik Indonesia masih jauh di bawah negara-negara Asia Timur lain, bahkan tingkat korupsi di Indonesia masih merupakan salah satu dari peringkat terbawah di seluruh dunia. Karena ketidakmampuan ketiga institusi bekerja dengan baik, demokrasi di Indonesia pun tidak mampu berjalan sebagaimana mestinya. Jika menurut Ober (2013) kebebasan dan *equality* adalah komitmen utama demokrasi, Indonesia tidak memiliki kedua elemen. Indonesia telah dianggap sebagai *free country* oleh *Freedom House*, namun *inequality* masih terlihat di seluruh penjuru negara hingga saat ini (Diamond, 2009; Aspinall, 2015).

Ketidaksuksesan demokrasi liberal di Indonesia tentu terjadi akibat banyak kendala yang tidak mudah dihilangkan. Dua kendala yang mungkin membuat demokrasi di Indonesia terganggu adalah kultur kolektivisme dan keberagaman etnis di Indonesia (McAuliffe et al., 2003; Fish & Brooks, 2004). Di masyarakat yang kolektif, demokrasi cenderung tidak mampu berjalan dibandingkan dengan masyarakat yang individualis (Gorodnichenko & Roland, 2015). Ciri-ciri masyarakat kolektif adalah sangat menghargai hal-hal yang berkaitan dengan kelompok dan merasa tidak bisa dipisahkan dari kelompok, entah itu dengan teman, keluarga, atau komunitas yang lebih besar (Oyserman et al., 2002; Cozma, 2011).

Perilaku orang-orang yang ada di negara kolektif akan cenderung mencari kesesuaian dan keterkaitan dengan masyarakat. Oleh karena itu, setiap individu seringkali sangat terkait dengan kelompok dimana dia tinggal (Roland, 2015). Setiap individu memiliki ketakutan tertentu jika melanggar norma-norma sosial, sehingga individu akan cenderung patuh terhadap nilai-nilai yang diterapkan di dalam kelompok (Gorodnichenko & Roland, 2015).

Kepatuhan terhadap lingkungan sosial tertentu membuat individu tidak akan mematuhi nilai-nilai atau hukum-hukum yang dipaksakan oleh negara (Triandis, 2001; Gorodnichenko & Roland, 2015). Tiga institusi yang disebutkan oleh Fukuyama (2015) dalam hal ini tidak akan berjalan dengan baik karena masyarakat cenderung akan memilih untuk mematuhi institusi-institusi dan hukum-hukum di dalam komunitas mereka dan mengacuhkan negara sebagai pembuat hukum tertinggi. Hukum negara demokrasi yang berlaku untuk masing-masing individu tidak akan berperan secara signifikan dalam masyarakat yang kolektivistis (Tamanaha, 2008).

Masyarakat kolektif juga sudah terbiasa dengan *equality* di dalam kelompok mereka. Karena kesamarataan yang telah mereka dapatkan di dalam kelompok, masyarakat tidak akan berusaha menuntut keadilan bagi setiap individu seperti yang tercermin di masyarakat negara demokrasi (Triandis, 2001). *Equality* yang terdapat di negara-negara Timur bersifat *hierarchical* yang membuat setiap manusia sangat terikat pada suatu ikatan hirarki (Liu, 2003). Masyarakat kolektif saat ini memiliki kesamaan dengan masyarakat di era aristokrat Eropa yang menurut de Tocqueville (2000) masih sangat terikat mulai dari raja sebagai hirarki tertinggi hingga rakyat sebagai hirarki terendah. Mereka semua terikat, tetapi mereka semua mematuhi individu yang berada di hirarki tertinggi dengan penuh dedikasi (de Tocqueville, 2000).

Bagi masyarakat kolektif, *freedom* atau kebebasan menjadi suatu yang membahayakan bagi hirarki, oleh karena itu perlu ada tekanan oleh pemerintah yang otoriter untuk tetap menjalankan hirarki (Roland, 2015). Pada dasarnya, di dalam masyarakat yang otoriter, menurut Roland (2015) akan selalu ada protes untuk menggantikan pemerintahan otoriter menjadi pemerintah yang lebih bebas.

Tetapi transisi menuju masyarakat baru di negara kolektif berbeda dengan negara-negara individualis. Di negara individualis, revolusi berarti transisi menuju demokrasi, tetapi di negara kolektif, revolusi hanya akan membawa pemimpin otoriter baru (Gorodnichenko & Roland, 2015). Hal ini dapat dilihat di Indonesia, meskipun Indonesia secara kasat mata adalah negara demokrasi, namun norma-norma otoriter masih sangat terlihat di Indonesia melalui masyarakat yang masih sangat terpengaruh oleh militerisme dan pemerintah yang masih dianggap sangat *predatory* (Mietzner, 2013).

Menurut Roland (2015), hanya masyarakat individualis yang bisa bertahan dengan demokrasi karena negara demokrasi menekankan hukum bagi setiap individu yang saling bersikap individualis. Sementara di masyarakat kolektif, masyarakat akan selalu menekankan pada tradisi dan stabilitas norma sosial sehingga demokrasi bukan satu-satunya sumber hukum di masyarakat kolektif (Gorodnichenko & Roland, 2015). Masyarakat kolektif seperti Tiongkok, Vietnam, dan Singapura memberikan contoh bahwa negara-negara kolektif tidak perlu menerapkan demokrasi untuk menjadi negara yang maju (Roland, 2015). Hal yang sama juga terjadi di negara-negara *post-Soviet* seperti Rusia, Ukraina, dan Belarusia dimana masih sangat sulit menerapkan demokrasi karena masih menerapkan kolektivisme (Mamontov et al., 2014).

Kendala demokrasi yang kedua adalah *multiethnicity*. Menurut Fearon (2001), Indonesia adalah negara paling multietnis di Asia Timur. Etnis-etnis di Indonesia berjumlah lebih dari 300 etnis yang tinggal di lebih dari 13.000 pulau (Paauw, 2009). Keberagaman etnis memang merupakan hal yang cukup rumit di Indonesia karena dasar penyatuan etnis-etnis yang ada di seluruh wilayah Indonesia hanya dilakukan akibat kesamaan nasib ketika dijajah oleh Belanda. Padahal, Belanda menyatukan Indonesia sebagai negara jajahan tanpa loyalitas tiap etnis. Hal ini membuat loyalitas etnis-etnis terhadap negara Indonesia pun tidak bisa dikatakan seragam (Trajano, 2010).

Menurut Max Weber, demokrasi hanya bisa digunakan di dalam *small state* dimana tidak terdapat *inequality* yang signifikan serta memiliki organisasi yang sederhana dan mudah dipahami (Shaw, 2008). Secara teoritis, konsep yang

dijelaskan oleh Fukuyama (2015) memiliki kemungkinan lebih besar untuk sukses bila diterapkan di *small state* seperti yang diungkapkan oleh Weber karena negara tidak memiliki banyak kerumitan sehingga institusi-institusi negara akan mampu berjalan secara efektif. Pendapat Weber mengenai ketidakcocokan demokrasi di negara-negara dengan kompleksitas yang cukup tinggi juga disetujui oleh Fish dan Brooks (2004). Salah satu kompleksitas yang ditekankan oleh Fish dan Brooks (2004) adalah heterogenitas etnis. Demokrasi tidak akan berjalan dengan baik ketika berada di negara yang memiliki etnis heterogen (Fish & Brooks, 2004). Penyebab ketidakmampuan demokrasi bertahan di dalam negara yang multietnis adalah karena heterogenitas etnis bisa menimbulkan *intercommunal violence*, yang kemudian dapat merusak *open politics* (Fish & Brooks, 2004; Fish & Kroenig, 2006). Horowitz (2014) menambahkan bahwa di dalam negara-negara besar yang memiliki etnis, agama, ras, maupun bahasa yang beragam, demokrasi sangat susah diaplikasikan karena akan cenderung menghasilkan *ethnic parties* dan *ethnic voting*. *Ethnic party* dengan hasil *voting* dan kursi mayoritas dapat mendominasi kelompok minoritas, dan menurut Horowitz (2014) akan berjalan cukup lama.

Ethnic domination kemudian bisa menjadi hasil akhir dari masyarakat dengan *ethnic based parties* (Horowitz, 2014). Perbedaan yang ekstrim di dalam masyarakat mengenai kultur, status, pendapatan, dan kekayaan membantu kemunculan rezim yang *hegemonic* dan *discriminatory* (Merkel & Weiffen, 2012). Di Indonesia terdapat satu etnis yang menguasai segala aspek di Indonesia, yaitu etnis Jawa (*Javanese*), yang berakibat orang-orang Jawa selalu berusaha menekankan kesuperioritasan mereka atas etnis-etnis lain yang memiliki jumlah lebih sedikit. Akibat pemikiran *hegemonic* etnis Jawa, etnis-etnis lain menjadi semakin tidak mampu menguasai politik di Indonesia dan muncul protes-protes yang mendestabilisasikan politik di Indonesia seperti di Provinsi Papua (Trajano, 2010). Perilaku *hegemonic* dari salah satu etnis mayoritas merupakan salah satu hal yang membuat demokrasi di Indonesia masih mengalami stagnasi. Fish dan Brooks (2004) mengatakan bahwa dengan kekuatan salah satu etnis, maka politik atau perekonomian akan dikuasai etnis mayoritas. Di negara-negara berkembang dengan

tingkat perekonomian rendah, politik dan sumber daya akan dikuasai etnis mayoritas yang kemudian akan menimbulkan kesenjangan (Fish & Brooks, 2004).

Secara teoritis, demokrasi bukan sistem pemerintahan yang paling cocok untuk negara multietnis dan dipenuhi dengan kesenjangan seperti Indonesia. Fish dan Brooks (2004) mengutip Lee Kwan Yew dan Mahathir Muhammad yang mengatakan bahwa demokrasi adalah sistem buruk bagi negara-negara multietnis. Bukan hanya di Singapura dan Malaysia, negara-negara multietnis seperti Uganda, Tiongkok, Myanmar, dan negara-negara Asia Tengah pun memiliki argumen yang sama (Fish & Brooks, 2004). Pernyataan negara-negara multietnis juga disetujui oleh Weber bahwa dalam pemerintahan yang memiliki struktur cukup rumit, kompetensi teknis yang cukup sangat dibutuhkan dan *'permanent technical official'* harus ditunjuk. Oleh karena itu, di dalam *modern states* yang sangat kompleks, negara membutuhkan seorang *rulers* yang bisa dipatuhi semua masyarakat (Shaw, 2008).

Kesimpulan

Bagi negara-negara demokrasi, kultur kolektivisme dan heterogenitas etnis menjadi suatu hambatan. Kolektivisme akan membuat masing-masing individu lebih terikat pada hukum kelompok dan tradisi daripada terhadap hukum negara. Sementara itu, negara demokrasi dengan heterogenitas etnis akan memunculkan etnis mayoritas yang akan menguasai politik dan ekonomi. Sehingga demokrasi tidak akan memberikan kebaikan bagi semua etnis yang ada di dalam negara. Negara-negara berkembang seringkali mengalami masalah dengan demokrasi dan heterogenitas etnis. *Inequality* kerap muncul di negara-negara berkembang yang tidak memiliki kekuatan ekonomi yang memadai. Ketidakpuasan etnis-etnis minoritas yang terhegemoni oleh etnis mayoritas terhadap *inequality* yang terjadi kemudian membuat peran demokrasi tersoroti. Jadi, demokrasi hanya cocok jika digunakan di negara-negara individualis, negara kecil, tidak memiliki struktur pemerintahan yang rumit, dan tidak memiliki perbedaan etnis yang cukup, kecuali negara tersebut cukup kuat secara ekonomi sehingga mampu menutupi *inequality* antara satu etnis dengan etnis lain. Untuk masyarakat yang kolektif dan sangat

heterogen, secara teoritis Weber mengatakan bahwa sistem otoriter lah yang sangat cocok bagi kelangsungan hidup negara.

Daftar Pustaka

- Aspinall, E. (2015) *Inequality and democracy in Indonesia* [Online]. Available from: <https://kyotoreview.org/issue-17/inequality-and-democracy-in-indonesia/> [Accessed 14 April 2017].
- Cozma, I. (2011) How are individualism and collectivism measured? *Romanian Journal of Applied Psychology*, 13(1), pp.11-17.
- de Tocqueville, A. (2000) *Democracy in America*. Chicago, OH: The University of Chicago Press.
- Diamond, L. (2009) *How is Indonesia's democracy doing?* [Online]. Available from: <http://www.eastasiaforum.org/2009/10/26/how-is-indonesias-democracy-doing/> [Accessed 14 April 2017].
- Eldridge, P. (2002) Human Rights in Post-Suharto Indonesia. *The Brown Journal of World Affairs*, 9(1), pp.127-39.
- Fearon, J.D. (2003) Ethnic and Cultural Diversity by Country. *Journal of Economic Growth*, 8(2), pp.195-222.
- Fish, M.S. & Brooks, R.S. (2004) Does Diversity Hurt Democracy? *Journal of Democracy*, 15(1), pp.154-66.
- Fish, M.S. & Kroenig, M. (2006) Diversity, Conflict and Democracy: Some Evidence from Eurasia and East Europe. *Democratization*, 13(5), pp.828-42.
- Fukuyama, F. (2015) Why is Democracy Performing So Poorly? *Journal of Democracy*, 26(1), pp.11-20.
- Gorodnichenko, Y. & Roland, G. (2015) *Culture, Institutions and Democratization*. Working Paper 21117. Cambridge, MA: NBER Publications National Bureau of Economic Research.
- Hofstede, G. (2001) *Culture's consequences: Comparing values, behaviors, institutions, and organizations across nations*. 2nd ed. Thousand Oaks, CA: Sage Publications, Inc.

- Horowitz, D.L. (2014) Ethnic Power Sharing: Three Big Problems. *Journal of Democracy*, 25(2), pp.5-20.
- Jetten, J., Postmes, T. & McAuliffe, B.J. (2002) 'We're all individuals': group norms of individualism and collectivism, levels of identification and identity threat. *European Journal of Social Psychology*, 32, pp.189-207.
- Liu, Q. (2003) Understanding Different Cultural Patterns or Orientations Between East and West. *Investigationes Linguisticae*, 9, pp.21-30.
- Mamontov, V.D., Kozhevnikova, T.M. & Radyukova, Y.Y. (2014) Collectivism and Individualism in Modern Russia. *Asian Social Science*, 10(23), pp.199-207.
- McAuliffe, B.J., Jetten, J., Hornsey, M.J. & Hogg, M.A. (2003) Individualist and collectivist norms: when it's ok to go your own way. *European Journal of Social Psychology*, 33, pp.57-70.
- Merkel, W. & Weiffen, B. (2012) Does Heterogeneity Hinder Democracy? *Comparative Sociology*, 11, p.387-421.
- Mietzner, M. (2013) *Money, Power, and Ideology; Political Parties in Post-Authoritarian Indonesia*. Singapore: NUS Press Pte Ltd.
- Mietzner, M. (2014a) Indonesia's Future Trajectory under Joko Widodo. *Georgetown Journal of Asian Affairs*, pp.149-56.
- Mietzner, M. (2014b) How Jokowi Won and Democracy Survived. *Journal of Democracy*, 25(4), pp.111-25.
- Oyserman, D., Coon, H.M. & Kemmelmeier, M. (2002) Rethinking Individualism and Collectivism: Evaluation of Theoretical Assumptions and Meta-Analyses. *Psychological Bulletin*, 128(1), pp.3-72.
- Paauw, S. (2009) *One Land, One Nation, One Language: An Analysis of Indonesia's National Language Policy*. University of Rochester Working Paper in the Language Sciences, 5(1). University of Rochester.
- Roland, G. (2015) *Are there cultural obstacles to democratisation?* [Online]. Available from: <https://www.weforum.org/agenda/2015/05/are-there-cultural-obstacles-to-democratisation/> [Accessed 22 April 2017].
- Saxonhouse, A.W. (1998) Democracy, Equality, and Eide: A Radical view from Book 8 of Plato's Republic. *American Political Science Review*, 92(2), pp.273-83.

- Shaw, T. (2008) Max Weber on Democracy: Can the People Have Political Power in Modern States? *Constellations*, 15(1), pp.33-45.
- Tamanaha, B.Z. (2008) The Dark Side of the Relationship Between the Rule of Law and Liberalism. *NYU Journal of Law & Liberty*, 3, pp.516-47.
- Törnquist, O. (2014) Stagnation or Transformation in Indonesia? *Economic & Political Weekly*, XLIX(50), pp.23-27.
- Trajano, J.C.I. (2010) Ethnic Nationalism and Separatism in West Papua, Indonesia. *Journal of Peace, Conflict and Development*, (16), pp.12-35.
- Triandis, H.C. (2001) Individualism-Collectivism and Personality. *Journal of Personality*, 69(6), pp.907-24.
- Valdés, E.G. (2009) Dignity, Human Rights, and Democracy. *RMM Perspectives in Moral Science*, 0, p.253–265.